



## Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan dan Solusi atas Krisis Myanmar di Bawah Kepemimpinan Kamboja

Oleh

**Luthfy Ramiz dan Marina Ika Sari**

Peneliti di The Habibie Center

[luthfy@habibiecenter.or.id](mailto:luthfy@habibiecenter.or.id), [marina@habibiecenter.or.id](mailto:marina@habibiecenter.or.id)

### Pendahuluan

Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Pengambilalihan militer terjadi beberapa bulan setelah kemenangan telak NLD selama pemilihan November 2020, dengan meraih 396 dari 476 kursi parlemen.<sup>1</sup> Pihak Tatmadaw menentang hasil pemilu tersebut dengan dugaan telah terjadi kecurangan selama pemilu dan menuntut pemungutan suara ulang. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin NLD lainnya ditangkap sebagai tahanan rumah dan kekuasaan saat ini berada di tangan Jenderal Min Aung Hlaing.<sup>2</sup> Status keadaan darurat di Myanmar awalnya diberlakukan selama satu tahun, tetapi kemudian diperpanjang hingga Agustus 2023. Tatmadaw menyatakan akan mengadakan pemilu ulang yang bebas dan adil setelah keadaan darurat selesai.<sup>3</sup>

Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar-besaran dari berbagai kalangan masyarakat Myanmar yang menyatakan penolakan atas kudeta dan menuntut untuk memulihkan demokrasi. Untuk meredam aksi demonstrasi tersebut, Tatmadaw menerapkan aturan jam malam, pemutusan jaringan internet untuk membatasi akses informasi di dunia maya, pembatasan kerumunan, pengerahan kendaraan lapis baja, dan penggunaan kekerasan seperti peluru karet, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan massa.<sup>4</sup>

Permasalahan politik domestik di Myanmar telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan setahun pasca kudeta. Protes atas kudeta telah mengakibatkan sekitar 1.500 orang tewas dan 11.838 penentang



telah ditangkap oleh pihak militer, 405.700 orang mengungsi sejak Februari 2021 - Januari 2022, dan 6,2 juta orang diperkirakan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat tahun ini.<sup>5</sup> Krisis kemanusiaan juga diperburuk dengan sulitnya akses dan distribusi bantuan kemanusiaan karena Tatmadaw memberlakukan blokade terhadap distribusi bantuan kemanusiaan dan menerapkan sejumlah pembatasan yang berdampak secara tidak langsung pada distribusi bantuan.<sup>6</sup>

Reaksi dunia internasional terhadap isu kudeta di Myanmar pun beragam. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Uni Eropa mengecam kudeta dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Tatmadaw karena dinilai telah merusak demokrasi dan supremasi hukum serta melanggar hak asasi manusia.<sup>7</sup> Di sisi lain, China dan Rusia mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan intimidasi sepihak, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan meninggalkan konfrontasi di kawasan.<sup>8</sup> Di level regional, suara ASEAN terpecah karena setiap negara anggota ASEAN memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi isu kudeta Myanmar. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina menganggap kudeta dan krisis di Myanmar sebagai urusan internal sehingga ASEAN tidak perlu melakukan intervensi. Sementara itu, Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengekspresikan keprihatinan yang mendalam atas pergolakan politik di Myanmar dan menyerukan pihak terkait untuk menahan diri serta menyelesaikan sengketa melalui dialog yang damai.<sup>9</sup>

## **Analisis: Prospek Pendekatan Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2022 dalam Krisis Myanmar**

Sebagaimana Kamboja telah mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2022, peningkatan peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar menjadi salah satu tugas yang diemban oleh Kamboja. Salah satu agenda prioritas keketuaan Kamboja adalah memperbaiki situasi di Myanmar yang didasarkan pada Lima Poin Konsensus dan Piagam ASEAN sebagai prinsip panduan dalam menangani krisis.<sup>10</sup> Kementerian Luar Negeri Kerajaan Kamboja menyatakan bahwa kepemimpinan Kamboja akan menekankan sentralitas ASEAN dalam membangun suasana yang kondusif untuk membangun dialog dan menciptakan kepercayaan berbagai pihak dalam mengurangi kekerasan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.<sup>11</sup>

Pendekatan Kamboja terhadap krisis Myanmar sejauh ini dapat dilihat pada kunjungan Perdana Menteri (PM) Hun Sen ke Myanmar pada 7 Januari 2022. Kunjungan kenegaraan dari seorang kepala pemerintahan ke Myanmar ini adalah yang pertama sejak terjadinya kudeta militer. PM Hun Sen dan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn, dalam lawatannya bertemu dengan Jenderal





Senior Min Aung Hlaing dan jajaran pejabat Tatmadaw dalam *State Administration Council* (SAC).

Kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar menyebabkan adanya perbedaan pendapat di dalam tubuh ASEAN sehingga memicu penangguhan pertemuan *retreat* antar Menteri Luar Negeri ASEAN yang sejatinya dilaksanakan pada 18-19 Januari 2022. Akhirnya, setelah sempat ditunda, pertemuan *retreat* para Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan pada 17 Februari 2022.<sup>12</sup> Kamboja awalnya menunjukkan gestur ingin mengundang pemimpin Tatmadaw ke pertemuan ASEAN dengan syarat sudah ada kemajuan dalam memenuhi Lima Poin Konsensus yang telah disepakati ASEAN. Tindakan ini mengindikasikan bahwa Kamboja berupaya ingin melibatkan Tatmadaw dalam forum ASEAN, bukan mengisolasinya. Namun, Kamboja mendapatkan tekanan dari beberapa negara ASEAN untuk tidak mengalah pada kesepakatan yang didukung oleh PBB dan Amerika Serikat.<sup>13</sup> Akhirnya, Kamboja pun memutuskan hanya mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuan tersebut alih-alih pemimpin Tatmadaw. Hal ini ditanggapi oleh Myanmar dengan tidak berpartisipasi atau mengirimkan perwakilan non-politiknya.

Walaupun lawatan PM Hun Sen ke Myanmar telah “memecah” suara ASEAN, namun pada akhirnya dapat memberikan kesempatan untuk berdialog dengan pihak Tatmadaw. Dialog tersebut diantaranya terkait keputusan untuk memperpanjang waktu gencatan senjata antara Tatmadaw dan kelompok bersenjata etnis hingga akhir 2022, penyelenggaraan pertemuan konsultatif antara Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Sekretaris Jenderal ASEAN, perwakilan *AHA Centre*, Gugus Tugas Nasional Myanmar, Palang Merah Myanmar, dan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan, serta berdiskusi tentang pengalaman proses perdamaian yang terjadi Kamboja. Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Senior Min Aung Hlaing kembali menegaskan bahwa Tatmadaw menjamin kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait dengan pertimbangan situasi di Myanmar.

Langkah yang diambil Kamboja terhadap krisis Myanmar sejatinya telah “mencairkan” hubungan antara ASEAN dan Myanmar yang membeku pasca kudeta militer. Mencairnya hubungan tersebut berpotensi membangun unsur-unsur yang sejatinya “hilang” dalam proses implementasi Lima Poin Konsensus setahun belakangan – situasi yang kondusif untuk membangun dialog dan membangun kepercayaan. Dalam kunjungannya ke Myanmar, PM Hun Sen berupaya untuk membangun kepercayaan pihak Tatmadaw sebagai pemerintah *de facto* Myanmar melalui dialog untuk kemudian mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Lima Poin Konsensus oleh Myanmar, diantaranya akses pada pemberian bantuan kemanusiaan dan perizinan Utusan Khusus ASEAN untuk bertemu dengan anggota





partai NLD. Dengan adanya wacana kunjungan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn pada 20-23 Maret 2022,<sup>14</sup> bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa nantinya Kamboja dapat melibatkan pihak lainnya dalam dialog sesuai dengan Lima Poin Konsensus.

Selain kunjungan kenegaraan PM Hun Sen ke Myanmar, pendekatan Kamboja terhadap penyelesaian krisis Myanmar juga ditandai dengan wacana pembentukan tripartit antara Kamboja, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Melalui pernyataannya, PM Hun Sen menegaskan pembentukan tripartit tersebut berkaitan dengan perpanjangan waktu gencatan senjata di Myanmar hingga akhir 2022.<sup>15</sup> Mediasi menggunakan metode tripartit sendiri merupakan salah satu praktek yang sebelumnya pernah diimplementasikan oleh ASEAN pada proses perdamaian di Kamboja pada tahun 1997.

Proses perdamaian melalui mekanisme tripartit pada krisis di Kamboja dipimpin oleh ASEAN dilandaskan pada asas non-intervensi, sesuai yang diamanatkan dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Tripartit, yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Filipina Domingo Siazon, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, dan Menteri Luar Negeri Thailand Prachuab Chaiyasarn, bertugas menyusun mekanisme mediasi dan memfasilitasi proses perdamaian di Kamboja. Tidak hanya didukung oleh mediasi yang difasilitasi oleh tripartit ASEAN, proses perdamaian di Kamboja juga didorong oleh mitra ASEAN yang tergabung dalam kelompok *ad hoc Friends of Cambodia* yang terdiri dari Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Russia, dan Amerika Serikat yang mendukung kinerja tripartit dan mendorong solusi atas krisis Kamboja, termasuk pengakhiran kekerasan, jaminan keamanan, penyelenggaraan pemilu yang adil, serta jaminan hak ikut serta kepada semua pihak dalam pemilu.<sup>16</sup> Berjalannya proses perdamaian di Kamboja melalui metode mediasi tripartit dapat dijadikan acuan dan dikembangkan Kamboja selaku Ketua ASEAN dalam penanganan krisis Myanmar.

## Simpulan

Berkaca pada langkah yang telah ditempuh dan yang berpotensi untuk dilakukan oleh Kamboja sebagai Ketua ASEAN serta sikap negara anggota ASEAN lainnya, keberhasilan Kamboja dalam menangani krisis Myanmar masih perlu terus diamati ke depannya mengingat dinamika kawasan yang terus berkembang. Kinerja Kamboja dalam menangani masalah internal di kawasan dapat dinilai setelah masa jabatannya selesai pada akhir tahun 2022. Konsekuensi yang pasti, jika krisis Myanmar tidak dapat diselesaikan tahun ini, tugas ini akan menjadi pekerjaan rumah pada keketuaan Indonesia tahun 2023 mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan soliditas dan komitmen yang kuat dari semua negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar.





Penulis merekomendasikan empat hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di ASEAN dalam menangani krisis Myanmar, antara lain:

1. ASEAN perlu mengkaji penerapan prinsip non-intervensi secara lebih fleksibel pada krisis Myanmar dengan memperhatikan prinsip-prinsip lain yang juga tercantum dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip *good governance*, dan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Kamboja perlu memfasilitasi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dalam membangun dialog agar dapat menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar, baik dari Tatmadaw, NLD, maupun pihak sipil agar mendapatkan informasi dan pandangan yang menyeluruh secara langsung. Kemudian, negara anggota ASEAN perlu menyepakati peta jalan dan memberikan tenggat waktu kepada pihak junta militer untuk memastikan bahwa Lima Poin Konsensus benar-benar diterapkan di Myanmar.
3. Kamboja perlu mendorong wacana pembentukan tripartit sebagai bagian dari proses mediasi krisis Myanmar dengan mencontoh praktek lampau dari proses perdamaian di Kamboja. Selain itu, Kamboja perlu menggalang dukungan dan komitmen mitra wicara ASEAN untuk mendukung proses mediasi tersebut.
4. Indonesia perlu memainkan perannya secara lebih aktif dalam mendukung langkah dan pendekatan Kamboja dalam memediasi krisis Myanmar. Sehingga, jika krisis Myanmar tidak dapat diselesaikan dalam tahun ini, Indonesia dapat melanjutkan dan meningkatkan upaya yang telah dilakukan oleh Kamboja sebelumnya, mengingat Indonesia akan menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023.







## Endnotes

- 1 Kinasih, S. (2022). *Sejarah Membuktikan Militer Myanmar Memang Gatal Kudeta*. tirta.id. Retrieved 28 February 2022, from <https://tirta.id/sejarah-membuktikan-militer-myanmar-memang-gatal-kudeta-f91X>.
- 2 Kompas.com. (2022). *Awal Mula Kerusuhan Myanmar: Dipicu Kudeta, Militer Berkuasa*. Kompas.com. Retrieved 28 February 2022, from <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/162024770/awal-mula-kerusuhan-myanmar-dipicu-kudeta-militer-berkuasa?page=all>.
- 3 *Ibid.*
- 4 BBC News Indonesia. (2022). *Anak-anak muda di jantung protes Myanmar: 'Kami tak mau kembali ke masa gelap di bawah diktator'*. BBC News Indonesia. Retrieved 28 February 2022, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56292578>.
- 5 Reuters. (2022). *Factbox: Myanmar's Post-coup Crisis in Numbers*. Reuters. Retrieved 28 February 2022, from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-post-coup-crisis-numbers-2022-01-31/>.
- 6 Sullivan, D. P. (2021). *Dire Consequences: Addressing the Humanitarian Fallout from Myanmar's Coup (p. 8)*. Refugees International. Retrieved from <https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/61704056d5c2b338bb5d6744/1634746454791/Dire+Consequences-+Addressing+the+Humanitarian+Fallout+from+Myanmar%E2%80%99s+Coup.pdf>
- 7 Deutsche Welle. (2022). *Uni Eropa dan Inggris Jatuhkan Sanksi Baru untuk Pejabat Militer Myanmar*. DW. Retrieved 2 March 2022, from <https://www.dw.com/id/ue-inggris-jatuhkan-sanksi-baru-untuk-pejabat-junta-myanmar/a-57987340>.
- 8 Republika Online. (2022). *China dan Rusia Dukung Myanmar Cari Solusi Politik*. Republika Online. Retrieved 2 March 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qqgmnp382/china-dan-rusia-dukung-myanmar-cari-solusi-politik>.
- 9 Kapur, R. (2022). *ASEAN and Myanmar: No Sign of Progress*. Lowy Institute. Retrieved 2 March 2022, from <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-and-myanmar-no-sign-progress>.
- 10 Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia. (2022). *Press Release: Briefing on Cambodia's ASEAN Chairmanship in 2022*. Retrieved from <https://www.mfaic.gov.kh/posts/2021-12-31-Press-Release-Briefing-on-Cambodia-s-ASEAN-Chairmanship-in-2022-on-29-December-2021--10-53-43>.
- 11 *Ibid.*
- 12 Republika Online. (2022). *ASEAN Retreat Dimulai, Myanmar Masih Jadi Isu Utama*. Republika Online. Retrieved 12 March 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/r7fuc9370/asean-retreat-dimulai-myanmar-masih-jadi-isu-utama>.
- 13 The Jakarta Post. (2022). *Hun Sen Urges Myanmar Junta Chief to Allow Aid, Envoy Visit*. The Jakarta Post. Retrieved 15 March 2022, from <https://www.thejakartapost.com/world/2022/01/26/hun-sen-urges-myanmar-junta-chief-to-allow-aid-envoy-visit.html>.
- 14 Republic of the Union of Myanmar National Unity Government. (2022). *Press Release on the Visit of Special Envoy of the ASEAN Myanmar*. Republic of the Union of Myanmar National Unity Government. Retrieved 24 March 2022, from <https://gov.nugmyanmar.org/2022/03/22/press-release-on-the-visit-of-special-envoy-of-the-asean-chair-to-myanmar/>.
- 15 Sochan, R. (2022). *PM Eyes Myanmar Peace Troika*. Phnompenhpost.com. Retrieved 10 March 2022, from <https://www.phnompenhpost.com/national-politics/pm-eyes-myanmar-peace-troika>.
- 16 Merican, D. (2007). *Cambodia's Engagement with ASEAN: Lessons for Timor Leste*. *CICP Working Paper*, (14), 12-14. Retrieved 10 March 2022, from <https://cicp.org.kh/wp-content/uploads/2021/02/CICP-working-paper-14-Cambodias-Engagement-in-ASEAN-by-Din-Merican.pdf>.





# THC INSIGHTS

**THC Insights** are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

**Contact:**

The Habibie Center  
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560  
Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212  
Email: [thc@habibiecenter.or.id](mailto:thc@habibiecenter.or.id)  
Website: [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)